

**BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** yakni **“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Dan Desa Yang Transparan, Akuntabel Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik”** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**. Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik</b>									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
<b>S.17 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</b>									
IS.27	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IS.28	Nilai SAKIP	64,24 (B)	80,01 (A)	82,00 (A)	84,00 (A)	86,00 (A)	88,00 (A)	90,01 (AA)	90,01 (AA)

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2019

**Tabel 7.2**  
**Keterhubungan Renstra Inspektorat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH		SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	1. Opini BPK					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	2. Hasil Evaluasi Sakip					64,24 (B)	80,01 (A)	82,00 (A)	84,00 (A)	86,00 (A)	88,00 (A)	90,01 (AA)	90,01 (AA)	
		1. Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peran pengawasan internal	1. Opini Pemeriksa Eksternal WTP terhadap LKPD				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan		1. Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03 - BPK	n/a	30	32	34	36	38	40	42		
				- Inspektorat	n/a	30	32	34	36	38	40	42		
				2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	97,7	97,2	97,594	97,988	98,382	98,776	99,17	99,17		
		2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2. Nilai AKIP Perangkat Daerah baik	2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	3. Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja memuaskan	4,76 (2 PD)	21,43(9 PD)	42,85 (18 PD)	64,3(27 PD)	85,7(36 PD)	100(42 PD)	100(42 PD)	100(42 PD)	100(42 PD)

					4. Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan	95,52	100	100	100	100	100	100	100
				3. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	5. Nilai Reformasi Birokrasi	67	70	71	72	73	74	75	76
		2. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten	Tingkat Kapabilitas APIP menurut IACM	4. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan	6. Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di level 3	Level 3 dengan catatan	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, 2019

Inspektorat Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan, memiliki indikator-indikator kinerja, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara hierarki, Indikator Kinerja Utama merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon II, kemudian Indikator Program merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon III, dan yang terakhir Indikator Kegiatan merupakan indikator penilaian terhadap kinerja Pejabat Eselon IV. Indikator Kinerja Utama sering disebut sebagai *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah, Indikator Program biasa disebut sebagai *Outcome*, sedangkan Indikator Kegiatan biasa disebut sebagai *Output*.

Inspektorat Daerah memiliki 5 (lima) IKU sebagai indikator keberhasilan penguatan di bidang pengawasan, yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan indikator sasaran adalah :
  - a. Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03
  - b. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator sasaran adalah
  - a. Persentase PD dengan hasil evaluasi kinerja minimal baik
  - b. Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan
3. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah dengan indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi
4. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan dengan indikator Tingkat levelling kapabilitas APIP menuju IACM di level 3.